



Jakarta, MIMBAR - Permohonan PDI Perjuangan (PDIP) yang mempersoalkan penetapan hasil Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024 akan diputus pada Kamis, 10 Oktober mendatang.

“Tanggal sidang: Kamis, 10 Oktober 2024. Agenda: pembacaan putusan secara elektronik melalui e-court,” demikian dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rabu (2/10).

Perkara nomor: 133/G/TF/2024/PTUN.JKT sudah berlangsung empat bulan lebih dengan sidang perdana pada Kamis, 30 Mei 2024. Laman SIPP PTUN Jakarta tidak menampilkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

■ Bersambung ke Hal 11

Nasib Prabowo-Gibran Diputus Pekan Depan

Jokowi Digugat Rp5 Ribu Triliun

Jakarta, MIMBAR - Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perbuatan melawan hukum.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh lima pihak, yakni Habib Rizieq Shihab, Munarman, Eko Santjojo, Edy Mulyadi, Mursalim, Marwan Batubara, dan Soenarko melalui Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan (Tamak). Gugatan tersebut juga telah teregister dengan nomor perkara 611/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tertanggal 30 September 2024.

■ Bersambung ke Hal 11



Jadwal Salat

29 RABIUL AWAL 1446 H

Subuh : 04:58 WIB	Maghrib : 18:19 WIB
Zuhur : 12:18 WIB	Isya : 19:28 WIB
Ashar : 15:28 WIB	

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah

Gibran Batal Dilantik?

Oleh Dr A Rasyid, MA (Dosen FIS UINSU)

BILA pada 10 Oktober 2024 keluar Keputusan PTUN yang membuat Gibran batal dilantik sebagai wakil presiden, itu tidak berarti Prabowo Subianto, sebagai presiden terpilih, juga akan batal dilantik. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden merupakan dua proses yang terpisah. Meskipun ada harapan untuk sinergi antara Presiden dan Wakil Presiden, keputusan hukum mengenai satu posisi tidak selalu mempengaruhi posisi lainnya. Namun,

■ Bersambung ke Hal 11



Iran meluncurkan puluhan rudal ke wilayah Tel Aviv, Israel. Iron dome Israel kebocoran dalam menghadapi serangan rudal Iran.

Iran Bombardir Israel

RATUSAN RUDAL DILUNCURKAN

Tel Aviv, MIMBAR - Iran melancarkan serangan besar-besaran menggunakan rudal ke Israel pada Selasa (1/10), hanya beberapa jam setelah pejabat Gedung Putih memperingatkan bahwa Teheran “segera” merencanakan serangan.

Beberapa rudal berhasil diintersepsi di langit Yerusalem, namun banyak di antaranya tampak terus melaju ke arah pesisir dan wilayah tengah Israel, disertai suara bom yang meledak

di kejauhan. Di tepi Kota Tua, banyak warga yang berhenti dan menyaksikan rudal-rudal tersebut terbang di atas mereka dalam serangan yang tampaknya belum pernah terjadi sebelumnya.

Sekitar 10 menit kemudian, gelombang kedua rudal terpantau melintasi kota, kali ini dari arah yang berbeda. Kilatan terang dari upaya intersepsi terlihat di langit diiringi suara ledakan keras.

Juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Daniel

Hagari mengatakan dalam pidato yang disiarkan di televisi bahwa tidak ada laporan cedera di darat saat Iran menembakkan sekitar 200 roket.

Ia menambahkan bahwa tampaknya tidak ada lagi ancaman senjata masuk dari Iran “untuk saat ini” tetapi menambahkan bahwa Israel tetap siap.

Iran telah berjanji akan

■ Bersambung ke Hal 11



Netanyahu: Iran Buat Kesalahan Besar

Tel Aviv, MIMBAR - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah akan melakukan pembalasan atas serangan 200 rudal balistik Iran pada Selasa (1/10) malam.

“Iran melakukan kesalahan besar malam ini dan mereka akan membayar harganya,” kata Netanyahu di awal pertemuan kabinet keamanan tak lama setelah serangan rudal Iran berlangsung.

■ Bersambung ke Hal 11

long Dede

■ Apa masih mungkin...??

■ Hehehe..

Doa Ketum PAN di Kabinet Prabowo

Mudah-mudahan Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah

KETUA Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menaruh harapan Menteri Pendidikan di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat diisi oleh kader Muhammadiyah.

“Tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikannya dari Muhammadiyah, Insya Allah,” kata Zulhas dalam acara ‘Sumbang Pemikiran Rektor PTMA untuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto’ di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta yang

disiarkan di kanal YouTube Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rabu (2/10).

Zulhas turut menjelaskan dirinya selama ini terus melakukan perjuangan di bidang politik. Baginya, perjuangan di bidang politik sangat penting, terutama untuk memperjuangkan Muhammadiyah juga.

Ia mengatakan perjuangan partai di bidang politik cuma dua, yakni perjuangan di bidang legislatif dan eksekutif.

“Kalau dua-duanya enggak punya, dia enggak ada. Saya ambil contoh kita dukung A. Tak dukung B.

■ Bersambung ke Hal 11



Polisi Jamin Usut Kasus Pembubaran Diskusi di Kemang

Jakarta, MIMBAR - Polda Metro Jaya melakukan evaluasi internal menyoal pembubaran diskusi oleh sekelompok orang di hotel Kemang, Jakarta Selatan. Sebanyak 30 polisi diperiksa Bidang Propam Polda Metro Jaya untuk menjamin pengu-sutan secara transparan. "Terkait audit atau evaluasi internal perkembangan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda metro jaya, sampai dengan saat ini ada 30 anggota Polri yang dilakukan pemeriksaan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (2/10). Ade Ary menyebut mereka yang diperiksa mulai dari anggota Polsek Mampang Prapatan, Polres Metro Jakarta Selatan hingga Polda Metro Jaya. Selain itu, enam orang masyarakat sipil juga diminta keterangan oleh Propam. Ade Ary menegaskan pihaknya akan mengusut tuntas kasus tersebut. Dia menegaskan pihak kepolisian tidak mentolerir tindakan premanisme yang terjadi, berupa pembubaran paksa diskusi oleh kelompok tertentu.

"Komitmen Polda metro jaya untuk mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi dan tidak memberikan ruang kepada para pelaku kejahatan, premanisme, persekusi atau aksi kekerasan. Pasti akan diungkap dan ditangkep pelakunya, ini komitmen bapak Kapolda Metro Jaya memberikan rasa aman kepada warga masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya," jelasnya. Saat ini Polda Metro Jaya telah menetapkan tiga orang tersangka terkait pembubaran diskusi tersebut. Mereka adalah tersangka FEK sebagai koordinator lapangan, tersangka GW dan tersangka MR alias RD yang melakukan pembubaran dan menganiaya sekuriti hotel. Dua orang sekuriti dilaporkan terluka imbas kejadian tersebut. Para pelaku juga merusak balihoo acara diskusi yang dipasang di area hotel. Acara diskusi tersebut diketahui dihadiri sejumlah tokoh, seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan pakar hukum tata negara Refly Harun. (det/js)

Lagi, Jokowi Minta Maaf ke Warga NTT

NTT, MIMBAR - PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta maaf kepada warga sebelum masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober di Pasar Baru Kefamenanu, Timor Tengah Utara, NTT, Rabu (2/10). Jokowi mengatakan hanya manusia biasa yang penuh kekhilafan dan tak luput dari kesalahan. "Pada kesempatan yang baik ini bapak ibu seluruh warga yang saya hormati, saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh

dengan kekurangan, yang penuh dengan kekhilafan," kata Jokowi. Jokowi kemudian meminta maaf kepada warga NTT jika selama dirinya memimpin Indonesia ada kesalahan dan kebijakan yang kurang berkenan. "Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan, atas segala kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati bapak ibu sekalian," ujarnya. Di sisi lain, Jokowi memastikan harga pangan

di Pasar Baru Kefamenanu tak semuanya stabil. Ia mengatakan harga cabe rawit kini mengalami penurunan. Sementara harga bawang merah dan bawang putih stabil. "Tapi ada juga harganya yang naik yaitu beras," katanya. Jokowi-Ma'rif akan digantikan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden yang baru lantaran telah memenangkan Pilpres 2024. Prabowo-Gibran akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. (cnni/js)

Jokowi Digugat...

Dari Halaman 1

Dalam gugatannya, Joko Widodo dianggap melakukan serangkaian kebohongan sejak menjabat sebagai Gubernur Jakarta hingga menjadi Presiden RI. Dijelaskan, rangkaian kebohongan Jokowi dikemas dalam rangka pencitraan untuk menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Rangkaian kebohongan itu dikemas Jokowi dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana, dan prasarana dari ketatanegaraan. "Rangkaian kebohongan Jokowi akan mencoreng sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa bila dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum," kata Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan (Tamak), Azis Yanuar dikutip redaksi, Rabu (2/10). Azis mengklaim, gugatan tersebut dilayangkan berdasarkan fakta-fakta rangkaian kebohongan Joko Widodo sejak menjabat sebagai Gubernur Jakarta hingga menjadi Presiden RI. Fakta pertama, kata Azis, adalah kebohongan soal komitmen untuk menjabat sebagai gubernur DKI selama satu periode penuh, atau 5 tahun dan tidak menjadi kutu loncat. Kedua, kebohongan

mengenai data 6.000 unit pesanan mobil Esemka. Ketiga, kebohongan menolok pinjaman luar negeri atau asing. Keempat, kebohongan akan melakukan swasembada pangan. Kelima, kebohongan tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur, seperti kereta cepat KCIC. "Keenam, kebohongan mengenai data uang Rp11 ribu triliun yang ada di kantong Jokowi dan rangkaian kebohongan Jokowi lainnya. Telah nyata semua pernyataan Jokowi tersebut hanya merupakan kebohongan," tegas Azis. Atas dugaan berbagai kebohongan tersebut, maka para penggugat meminta kepada Majelis Hakim PN Jakpus menghukum Jokowi membayar ganti rugi materiil sebesar nilai utang Indonesia periode 2014 sampai 2024 atau selama Jokowi menjabat sebagai presiden untuk disetorkan kepada kas negara. Kemudian, memerintahkan kepada negara untuk menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi. "Memerintahkan kepada negara untuk menahan pembiayaan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi," tandas Azis. Sementara itu, Munarman sebagai salah satu

pihak penggugat mengatakan bahwa gugatan tersebut hanya sebagian dari perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Jokowi. "Tidak hanya kebohongan saja, dia juga melakukan kejahatan hak asasi manusia, kejahatan pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik, dan perampasan tanah-tanah rakyat melalui PSN (Proyek Strategi Nasional)," jelas Munarman. Selain itu, Munarman juga menegaskan bahwa gugatan tersebut dilayangkan ke PN Jakpus dalam kapasitas Jokowi sebagai pribadi, bukan sebagai Kepala Negara. "Yang kita gugat adalah Jokowi secara pribadi sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan dia menggunakan mekanisme ketatanegaraan untuk melakukan kebohongan," lanjut Munarman. Berkaitan gugatan ganti rugi materiil yang dilayangkan, Munarman menyebut Jokowi harus membayar ganti rugi senilai utang Indonesia selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. "Tuntutan kami yang disebutkan tadi (fasilitas rumah dan uang pensiun), kami minta tidak diberikan kepada Jokowi karena untuk mengganti kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh kebohongan Jokowi. Utang yang ditimbulkan Jokowi hingga kini sekitar Rp5.246 triliun," tutupnya. (rm/js)

Netanyahu: Iran...

Dari Halaman 1

Dikutip Times of Israel, Netanyahu mengklaim serangan ratusan rudal balistik Iran itu gagal berkat sistem pertahanan rudal Iron Dome dan bantuan Amerika Serikat. "Itu digagalkan berkat sistem pertahanan udara Israel, yang paling canggih di dunia," kata Netanyahu sembari mengucapkan terima kasih kepada AS atas dukungannya. Netanyahu lantas menganggap bahwa rezim Iran "tidak memahami tekad Israel untuk membela diri dan tekad kami untuk membalas serangan musuh kami." Ia bahkan bersumpah Israel akan menyerang balik siapa saja yang berani menyerang dan membahayakan keamanan negaranya. "[Pemimpin Hamas Yahya] Sinwar dan [kmandan militer tertinggi Hamas Mohammed] Deif tidak memahami hal ini, [Pemimpin Hezbollah Hassan] Nasrallah dan [kepala staf Hezbollah Fuad] Shukur juga tidak memahami ini, dan mungkin ada orang di Teheran yang juga tidak

memahami ini," ucap Netanyahu. "Mereka akan memahaminya. Siapa pun yang menyerang kami, kami akan menyerangnya," ujar Netanyahu menambahkan. Netanyahu menyatakan serangan Israel berlaku di mana pun negaranya itu melawan "poros kejahatan", termasuk di Tepi Barat, Gaza, Lebanon, Yaman, Suriah, dan Iran. "Kami akan melakukan segala yang diperlukan untuk melanjutkan tren ini, mencapai semua tujuan perang, terutama mengembalikan semua sandera kami, dan memastikan keberadaan serta masa depan kami," ujar Netanyahu. Meski sebagian besar rudal Iran itu mampu dicegat Iron Dome Israel, namun sejumlah peluru kendali tetap jatuh di beberapa wilayah termasuk ibu kota Tel Aviv hingga menghantam beberapa bangunan dan memicu kebakaran. Sirene peringatan juga sempat meraung-raung ratusan kali di seluruh penjuru Israel terutama Tel Aviv hingga memaksa sebagian warga berlindung. (cnni/js)



Hidayah

Gibran Batal...

Dari Halaman 1

situasi ini bisa mempengaruhi stabilitas dan dinamika pemerintahan ke depan. Dasar hukum yang menyatakan bahwa tidak perlu dilakukan pemilu ulang jika Gibran batal dilantik sebagai wakil presiden dapat merujuk pada beberapa hal, antara lain: 1. Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 6A dan Pasal 6B mengatur tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pelantikan mereka. Batalnya pelantikan wakil presiden tidak mengharuskan pemilu ulang. 2. Undang-Undang Pemilu: UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mekanisme pemilu, dan tidak mencakup ketentuan untuk mengulang pemilu hanya karena batalnya pelantikan salah satu calon. 3. Ketentuan tentang Kekosongan Jabatan: Jika posisi wakil presiden kosong, biasanya ada prosedur tertentu yang diatur untuk mengisi kekosongan tersebut, tanpa perlu mengulang pemilu. Dengan demikian, keputusan untuk tidak mengulang pemilu jika Gibran batal dilantik berlandaskan

pada peraturan perundang-undangan yang ada. Jika Gibran Rakabuming Raka batal dilantik sebagai Wakil Presiden akibat gugatan PDIP, Beberapa hal mungkin terjadi akibat gagalnya dilantik Gibran Sebagai Wakil Presiden adalah: bisa memicu perubahan dalam dinamika politik di internal PDIP dan hubungan dengan Gibran, yang mungkin akan mempengaruhi dukungan partai di masa depan. Kemudian, PDIP atau koalisi lainnya mungkin akan mencari calon pengganti untuk posisi wakil presiden, yang dapat mempengaruhi konfigurasi politik. Di lain hal, Gibran mungkin harus mengevaluasi kembali langkah politiknya dan strategi untuk mempertahankan dukungan publik dan partai. Tindakan PDIP bisa memicu reaksi dari pendukung Gibran atau masyarakat, yang mungkin berpengaruh pada popularitas partai. Jika gugatan berlanjut, bisa ada implikasi hukum yang lebih luas terkait dengan proses politik di Indonesia. Perkembangan ini akan sangat tergantung pada respon dari semua pihak yang terlibat. (*)

Nasib Prabowo-Gibran...

Dari Halaman 1

Tergugat dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Dalam perjalanannya, tepatnya pada Kamis, 30 Mei 2024, majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan permohonan pemohon intervensi atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Majelis hakim menyatakan kedudukan pemohon intervensi atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pihak tergugat II Intervensi dalam perkara nomor: 133/G/TF/2024/PTUN.JKT. Sejumlah bukti surat atau tulisan dan saksi-saksi telah dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya, PDIP melalui ketua umum Megawati Soekarnoputri mendaftarkan permohonan untuk menggugat KPU pada Selasa, 2 April 2024. PDIP meminta majelis hakim PTUN Jakarta memerintahkan KPU untuk menunda pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Majelis hakim diminta untuk tidak menerbitkan dan melakukan tindakan administratif apa pun sebagai bagian dari pelaksanaan Keputusan KPU 360/2024 sampai dengan perkara a quo berkekuatan hukum tetap. Dalam pokok perkara, PDIP meminta majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan batal Keputusan KPU dimaksud. Selain itu, majelis

hakim diminta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali Keputusan KPU 360/2024. "Memerintahkan kepada tergugat untuk melakukan tindakan mencabut dan mencoret pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana tercantum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024," bunyi petitum PDIP.

GIBRAN TAK BISA DILANTIK

Sebelumnya, Tim kuasa hukum PDIP mengatakan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berpotensi batal dilantik apabila gugatan yang pihaknya layangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dikabulkan. PDIP menggugat KPU terkait dugaan melakukan perbuatan melawan hukum karena tetap menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres di Pilpres 2024 lalu. "Yang bermasalah bagi kami Gibran, bagi kami, ya tidak bisa dilantik bahwa KPU memutuskan ini tidak bisa dilantik, orang bermasalah," ujar Ketua tim kuasa hukum PDIP, Gayus Lumbuun, usai persidangan di PTUN Jakarta, Kamis (18/7). Apabila penyelenggaraan pemilu tidak sah lantaran ditemukan cacat hukum karena KPU tidak konsultasi dengan DPR RI, kata dia, maka putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia minimal capres-cawapres tak bisa dieksekusi. "Risikonya diputuskan menang, tapi kan itu non-executable, tidak bisa dieksekusi," kata Gayus. Gayus turut menyinggung Undang-Undang

Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa putusan hakim Mahkamah Agung (MA) maupun MK tidak dapat dieksekusi apabila terdapat cacat hukum. Adapun Gayus menilai bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden pada Oktober 2024 mendatang hanya diikuti oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Sebab, Gayus berpandangan bahwa pencalonan Prabowo tidak cacat hukum. "Bisa begitu (yang dilantik hanya Prabowo). Karena pak Prabowo tidak cacat. Tidak ada yang salah di Pak Prabowo," ujar eks Hakim Agung tersebut. Gayus mengatakan, Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) yang nantinya bakal mengambil keputusan terkait apakah orang yang cacat hukum dilantik atau tidak. Dia juga turut menyebut keputusan MPR bukan merupakan sikap personal pimpinan, namun lembaga. "MPR bukan pribadi, seluruh sidang paripurna akan memutuskan, apakah bisa enggak orang cacat hukum dilantik. Ya MPR-nya bukan pribadi, saya ingatkan, bukan pimpinan, bukan personal, tapi lembaga di mana rakyat bermusyawarah di sana. Bisakah seseorang diangkat tapi cacat hukum diputus oleh sebuah lembaga peradilan seperti itu," ujar Gayus. PDIP menggugat KPU dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menolok pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres di Pilpres 2024 lalu. Dalam perjalanan perkaranya, PTUN Jakarta juga mengabulkan permohonan intervensi oleh Prabowo-Gibran di perkara antara PDIP dengan KPU. Adapun majelis hakim menyatakan Prabowo-Gibran merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut. (cnni/js)

Iran Bombardir...

Dari Halaman 1

mengimbuu semua pegawai dan keluarga mereka untuk berlindung di tempat hingga pemberitahuan lebih lanjut. Dalam peringatannya, Kedubes AS mengingatkan warganya untuk tetap waspada dan meningkatkan kesadaran keamanan pribadi mengingat insiden keamanan sering terjadi tanpa peringatan, termasuk tembakan mortir dan roket serta serangan drone. Israel memulai serangan darat ke Lebanon selatan yang disebut Operasi Panah Utara pada Senin malam, dengan tembakan artileri besar-besaran di sepanjang perbatasan. Serangan darat ini adalah operasi berkelanjutan pertama Israel di Lebanon sejak 2006, ketika kedua negara menandatangani perjanjian damai yang mengakhiri perang 34 hari antara Israel dan Hizbullah, milisi Syiah yang mendominasi Lebanon selatan. Pada Senin, otoritas Israel mengeluarkan perintah evakuasi kepada sekitar 30 desa di Lebanon selatan. Juru bicara militer Israel mengatakan kepada warga agar mengungsi ke utara Sungai Awali, sekitar 55 kilometer dari garis perbatasan antara kedua negara. Namun, alasan di balik keputusan untuk mengungsi beberapa desa dan bukan yang lainnya, serta alasan warga harus mengungsi sejauh itu ke utara, belum jelas. Di tengah serangan udara Israel yang terus menghantam Beirut dan penembakan di Lebanon selatan, tim penyelamat Lebanon melaporkan telah menemukan 25 jenazah dan menyelamatkan 13 orang yang terluka sejak Senin malam. Sekitar

600 orang dilaporkan telah mencari perlindungan di sebuah biara di kota Rmeish, dekat garis biru perbatasan. **FASE BERBAHAYA** Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, menyebut situasi ini sebagai "tahap paling berbahaya dalam sejarah Lebanon," dan menyatakan bahwa "sekitar 1 juta orang dari negara kami telah mengungsi akibat perang dahsyat yang dilancarkan Israel di Lebanon." Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyerukan gencatan senjata segera, dan memperingatkan bahwa "tidak ada yang menginginkan perang regional," karena dampaknya akan sangat besar bagi Timur Tengah dan ekonomi global. Sementara itu, pejabat AS memberikan dukungan hati-hati terhadap operasi Israel, dengan Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, menyetujui perlunya "membongkar infrastruktur serangan Hizbullah di sepanjang perbatasan." Keberhasilan militer Israel melawan Hizbullah tampaknya telah mendorong Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengambil langkah melawan organisasi yang didukung Iran, meskipun ada upaya diplomatik untuk mencegah eskalasi perang. Pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, tewas dalam serangan Israel di Beirut pada Jumat, yang merupakan pukulan besar bagi kelompok militan tersebut dan meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik di Timur Tengah. (cncb/js)

Mudah-mudahan Menteri...

Dari Halaman 1

Itu ada hitung-hitungan politik. Kalau saya enggak punya DPR, enggak mungkin bisa memperjuangkan apa yang disampaikan," kata dia. Zulhas berkata bahwa PAN kini ada di legislatif dan eksekutif. Ia pun optimistis bisa memperjuangkan Muhammadiyah lewat PAN.

"Tapi kalau kita punya DPR apalagi sekarang sudah menang dan dekat dengan Pak Prabowo, dan tadi yang disampaikan tak sulit untuk kita perjuangkan. Kami ada untuk memperjuangkan Muhammadiyah. Kami ada di politik untuk itu, tentu beriringan dengan kepentingan bangsa dan negara," kata dia. "Politik itu selalu ya kuat kadang-kadang enggak bisa bicara benar dan salah. Jika ke-

marin guru-guru kita banyak tak kembali, itu kebijakan politik penguasa," tambahnya. Kementerian Pendidikan bukan bidang yang asing bagi Muhammadiyah. Pada masa lalu, sejumlah tokoh Muhammadiyah sempat mengisi posisi Menteri Pendidikan, antara lain Muhadjir Effendy, Bambang Sudibyo, Yahya Muhaimin hingga Abdul Malik Fadjar. (cnni/js)